

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN WONOGIRI**

Muna Dzakiyyatur Rafidah¹, Masculine Muhammad Muqorobin²

Universitas Tidar, Magelang^{1,2}

munadzakiyyatur@gmail.ac.id¹ musculine@untidar.ac.id².

ABSTRACT

To create accurate information, the Ministry of Home Affairs designed an application for the Regional Government Information System (SIPD) as a useful application to achieve a successful coordination between the central government and regional governments. The implementation of SIPD is also aimed at the realization of good government, implementation of data technology-based regional planning and budgeting management. The implementation of SIPD is also to carry out the policies of each program Secretariat DPRD Wonogiri Regency activities, especially the. The case in this research is the implementation of SIPD at the Secretariat DPRD Wonogiri Regency. The object under study is the implementation of the SIPD application. The analytical model used in this research is descriptive qualitative analysis, using George Edward III's theory of communication, human resources, disposition and bureaucratic structure. This theory is used to analyze the implementation of the SIPD application. Ine of the obstacles in other dimensions is that there are still shortcomings in various aspects, it is still in the renewal/ development stage, and the system used is not perfect.

Keywords: SIPD, implementation, theory George Edward III.

ABSTRAK

Untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat, Kemendagri merancang suatu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi yang berguna untuk mencapai suatu keberhasilan koordinasi antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. SIPD di implementasikan juga bertujuan untuk terwujudnya pemerintah yang baik dari penyelenggaraan, pengelolaan, perencanaan, serta penganggaran wilayah yang berbasis teknologi data. Implementasi SIPD ini juga untuk menjalankan kebijakan dari setiap program kegiatan terkhususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri. Kasus dalam riset ini merupakan implementasi SIPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Objek yang diteliti merupakan implementasi dari aplikasi SIPD. Model analisis yang digunakan riset penelitian yakni analisis deskriptif kualitatif, dengan memakai teori George Edward III berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIPD. Salah satu hambatan pada dimensi lain yaitu berupa masih terdapat kekurangan dalam berbagai aspek, masih dalam tahap pengembangan/pembaharuan, dan belum sempurnanya sistem yang digunakan.

Kata Kunci: SIPD, implementasi, teori George Edward III.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tiga pilar ekonomi utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor koperasi. Di antara ketiganya, peran pemerintah sebagai entitas terbesar dalam sektor publik sangatlah krusial, terutama dalam mendorong kemajuan sektor publik itu sendiri. Berdasarkan Pasal 391 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengelola data keuangan serta data pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bahwa SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SIPD ini dirancang untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap tahap perencanaan dapat dipantau dan dikelola dengan baik, serta memfasilitasi akuntabilitas publik dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah.

Perubahan sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju otonomi daerah telah membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan cakupan tugas pemerintah secara keseluruhan. Dampak ini juga dirasakan secara langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Seiring dengan perubahan ini, terhadap akuntabilitas pemerintah dan keterbukaan informasi publik semakin meningkat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tata kelola ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah, untuk menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah tidak berlaku. PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur berbagai hal mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan ini menjelaskan secara rinci bahwa pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Di antara semua tahapan tersebut, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan harus dilakukan dengan optimal untuk memastikan keberhasilan tata kelola Pemerintahan Daerah.

Kemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Regulasi ini menggantikan Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 dan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi penting lainnya terkait Pemerintahan Daerah. Dengan diterapkannya SIPD, diharapkan kualitas dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pendataan dapat ditingkatkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam hal alokasi anggaran dan pelaksanaan program- program Pemerintah Daerah.

Guna mendorong terwujudnya sistem data dan informasi, kebijakan ini ditujukan guna memberikan fasilitas bagi pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan pengelolaan sistem informasi daerah yang efektif, valid, serta akurat. Guna mendorong sistem di pusat serta daerah kearah yang lebih baik, kebijakan ini sangat diharapkan untuk pengambilan keputusan.

Peneliti menggunakan teori George Edward III sebagai *guide analysis* dalam penelitian ini. George Edward III yang berguna untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik. Edward III menggunakan 4 variabel diantaranya: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan d) struktur birokrasi sebagai variabel yang akan dikaji sebagai berikut,

a) Komunikasi

Variabel komunikasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi sebuah kebijakan. Variabel ini merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam menjawab persoalan implementasi kebijakan. Suatu informasi dapat diketahui oleh para pembuat kebijakan apabila terdapat komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan. Jika ini terjalin dengan baik, maka implementasi akan efektif terlaksana. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Dalam bagan di atas, ada beberapa indikator yang dapat digunakan guna mencapai keberhasilan variabel komunikasi, menurut George Edward III (1980), sebagai berikut :

1) Transmisi yaitu adanya perpindahan atau penyaluran komunikasi. Dalam variabel ini, implementasi akan berjalan dengan baik apabila transmisi komunikasi terjadi dengan baik pula. Banyaknya tingkatan birokrasi yang dilalui dalam proses komunikasi menjadi penyebab terjadinya miskomunikasi, sehingga tujuan yang dicapai terhenti begitu saja dipertengahan jalan implementasi di terapkan.

2) Kejelasan. Artinya, pelaksana kebijakan harus menerima komunikasi yang jelas dari pembuat kebijakan. Agar tidak terjadi hal yang membingungkan ataupun ketidakjelasan bagi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

3) Konsistensi, yaitu dimana perlu adanya keteguh pendirian komunikasi yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan untuk diterapkan serta dilaksanakan. Dikarenakan, jika sering kali terjadi perubahan perintah pelaksanaan, maka akan memunculkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan syarat penting agar suatu implementasi atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Menurut George Edward III (1980), ada beberapa indikator yang dapat dilihat sejauh mana sumber daya berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1) Staff merupakan aktor utama dalam mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan dan staff atau pegawai juga merupakan factor utama terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Ini disebabkan karena kurangnya staff atau pegawai yang memadai serta tidak adanya *skills* yang dimiliki para staff atau pegawai dibidangnya.

2) Informasi memiliki 2 macam bentuk dalam menggerakkan implementasi kebijakan. Dua macam bentuk tersebut adalah:

a) Informasi yang berkenaan dengan data kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

b) Informasi yang berkenaan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan.

c) Wewenang. Wewenang ini seharusnya pada kodratnya haruslah bersifat formal. Hal ini dikarenakan agar pelaksana kebijakan dapat melaksanakan perintah secara lebih efektif. Wewenang ini diperlukan agar ketika kebijakan diterapkan, kekuatan imolementator dapat dilegitimasi.

d) Disposisi (Perilaku)

Perilaku dari pelaksana kebijakan juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Awaeh et al., 2018). Besar kemungkinan implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keputusan awal

kebijakan diterapkan, apabila perilaku pelaksana kebijakan cenderung mendukung pengimplementasian kebijakan yang diterapkan. namun sebaliknya, jika perilaku tersebut negatif, besar kemungkinan akan memunculkan konflik dan kendala yang serius.

e) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan menjadi tidak efektif apabila struktur birokrasi tidak kondusif terhadap jalannya implementasi kebijakan. Hal tersebut juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan yang seperti diharapkan. Faktor yang mempengaruhi variabel struktur birokrasi. Edward III (1980) menjelaskan dalam (Winarno, 2014) bahwa Standard Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi, sebagai berikut :

- a) Adanya SOP ini sangat diharapkan bagi pembuat kebijakan agar pelaksana kebijakan bisa memanfaatkan waktu yang ada.
- b) Fragmentasi adalah sebaran tanggung jawab yang diberikan kepada unit-unit organisasi yang masih dalam satu lingkup kebijakan. Namun, nyatanya banyak lembaga birokrasi yang menyatakan bahwa justru fragmentasi ini menimbulkan pandangan yang sempit. Hal tersebut menjadi konsekuensi bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang gagal serta tidak terlaksana dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian dan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah Analisis Penerapan SIPD Di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Data primer yaitu jenis data penelitian yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data tersebut dari informan melalui serangkaian wawancara.

(2) Data sekunder yaitu jenis data penelitian yang diperoleh dari teknik dokumentasi dan pemanfaatan sumber-sumber yang berkaitan dan dapat mendukung obyek yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu yang menyatakan jika pelaksanaan dari sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi ialah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka perkembangan pelayanan untuk masyarakat sangat diharapkan sebagai bentuk dorongan dukungan (Perpres No 95, 2018). SIPD ini sangat bagus di implementasikan. Sistem ini mendorong pelaksanaan informasi yang efektif, inovatif, serta berkualitas dengan menggiatkan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 di setiap Pemerintahan Kab/Kota. Seperti yang penulis telah jabarkan sebelumnya, sangat besar harapan pemerintah bagi setiap SKPD-SKPD di setiap Kab/Kota dalam mengimplementasikan aplikasi SIPD ini. Teori implementasi kebijakan yang berperspektif *topdown* dikembangkan oleh George Edward III. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Penerapan kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan (George Edward III, 1980). Pada bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, komunikasi dijalankan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri dengan mengundang OPD di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda). BPKD melakukan sosialisasi terkait tata cara penggunaan SIPD kepada pelaksana yang akan mengoperasikan layanan aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, BPKD juga melakukan secara *online* yaitu lewat *zoom meeting*.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksana kebijakan harus menggunakan sistem jemput bola, jika terdapat permasalahan pada tahap penginputan data di SIPD terkhusus pada bagian penatausahaan. Sosialisasi belum dilakukan secara bertahap sehingga pelaksana kebijakan masih sering terkendala dalam proses pelaksanaan.

2) Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam melaksanakan implementasi aplikasi SIPD

ini. Sering terjadi ketidakberhasilan implementasi ini disebabkan dari sumber daya yang ada, baik sumber daya yang tidak memadai maupun yang tidak berkompeten dalam bidangnya (Dione & Faradina, 2020).

Sumber daya yang tersedia di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah terpenuhi, mulai dari tersediannya sarana pendukung seperti computer, internet dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Jika dilihat di lapangan SDM yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri mempunyai potensi dan kemampuan dalam mengoperasikan SIPD serta memiliki tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. Untuk memaksimalkan agar penerapan dapat menyeluruh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri berupaya dalam meningkatkan kemampuan untuk implementasi SIPD.

3) Disposisi

Komitmen serta sikap jujur harus dimiliki sebagai wujud karakter yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggungjawab, karena suatu program dapat berhasil jika pelaksana kebijakan memiliki sikap. Dalam menjalankan suatu tanggung jawab, besar harapan yang di inginkan agar implementator ini melaksanakan tanggung jawab nya dengan sungguh-sungguh.

Disposisi dalam implementasi bisa menimbulkan kendala.

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti, sikap pelaksana atau perilaku pegawai yang mengoperasikan dan memegang kendali aplikasi SIPD telah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan, begitu juga dengan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas dalam bagian program dan keuangan yang memiliki anggaran yang besar. Dengan anggaran yang besar, maka penginputan data dalam aplikasi SIPD juga banyak. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah mendukung penuh terkait aplikasi SIPD sebagai saran untuk fasilitasi keuangan di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.

4) Struktur Birokrasi

Segi variabel struktur birokrasi tidak terjadi kendala sama sekali. Dikarenakan peneliti melihat bahwa struktur birokrasi ini sendiri sudah dijelaskan secara rinci didalam Permendagri No 70 Tahun 2019. Hal ini juga dipertegas oleh peneliti berdasarkan hasil yang peneliti lihat yaitu dari pengumpulan data hingga melaksanakan rapat evaluasi data, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah berpedoman pada

Permendagri No 70 Tahun 2019.

Dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan alur serta tata cara pelaksanaan SIPD. Namun, selain 4 indikator teori berdasarkan George Edward III tersebut, peneliti justru menemukan kendala lain dalam melakukan penelitian ini. Kendala tersebut yaitu berupa waktu. Waktu yang diberikan, dalam mengimplementasikan dan memahami penggunaan aplikasi SIPD ini sangat singkat. Berupa waktu dalam penginputan hingga validasi data, dikarenakan masih dalam tahap pengembangan sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka implementasi SIPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan teori George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam aspek komunikasi pelaksana kebijakan harus menggunakan sistem jempot bola, jika terdapat hambatan pada penginputan data SIPD, terkhusus di bagian *menu* penatausahaan. Namun, pada penerapan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan dapat dikatakan bahwa implementasi SIPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri berhasil jika dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD dan keterlambatan penyelesaian masalah oleh Kemendagri.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar sebaiknya pemerintah tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi bagi pengguna SIPD. Namun, juga melakukan diklat khusus bagi pengguna aplikasi SIPD agar pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri memahami jelas bagaimana tata cara penggunaan aplikasi SIPD itu sendiri dengan baik. Dari segi dimensi komunikasi demi untuk mendorong semangat kinerja pegawai khususnya pengguna aplikasi SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri sebaiknya memberikan *Reward* bagi pengguna aplikasi SIPD. Dikarenakan *Reward* ini merupakan hadiah kecil untuk memunculkan semangat kerja, sehingga diharapkan implementasi aplikasi SIPD ini juga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
- Awaeh, O., Pioh, N. R., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Dikecamatan Lirung. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/19161>
- Banea, Agnes Eyne. "Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 10.1 (2024): 73-83.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 12–32. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/921/0>
- Creswell, J. W. (2009). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*. 21(1), 62–79.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Edisi Revi).
- Permendagri, Pub. L. No. 70 Tahun 2019, 1 (2019). Perpres No 95, (2018)
- Rahmanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81–106.

<https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>

Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(2), 1–25.

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*.

Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas,

N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–13.